



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan peraturan daerah di Provinsi Banten sesuai asas dan hierarki peraturan perundang-undangan, perlu menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak efektif;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan daerah dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah, keberadaan peraturan daerah yang tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/544/OTDA Tanggal 4 Agustus 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pencabutan Peraturan Daerah telah dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 69 Seri E);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74 Seri E);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 14 Seri E);
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Seri E);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 40 Seri E);
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penganggaran dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 66 Seri D);
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 19);
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 46);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 November 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN: (4-211/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670619 199403 1 002

2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan, substansi dan materi muatannya sudah tidak sesuai/relevan dengan huruf BB Pembagian Urusan Pemerintahan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun perubahan yang paling signifikan dan sangat fundamental sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Perencanaan hutan dan pengawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi namun sudah kewenangan absolut dari Pemerintah Pusat.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan dan Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional, sudah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipiloleh karenanya Peraturan Daerah dimaksud harus dicabut.
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi di bidangnya diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan; dan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak sebagai peraturan daerah pengacuannya telah dicabut.
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten.

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal dan Deposito Provinsi Banten sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengaturnya, diantaranya terkait dengan;
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak sesuai lagi dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah perlu dicabut dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten.
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penganggaran dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu dicabut karena dasar pembentukan peraturan daerahnya sudah dicabut dan dengan telah diundangkannya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik; dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten harus dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2008 tentang Irigasi, masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tidak menjadi kewenangan provinsi berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 103